

**FIGHT AGAINST
WILDLIFE
CRIME**



Semester II 2021

Nawala CIWT

Driving Innovations, Elevate Knowledge

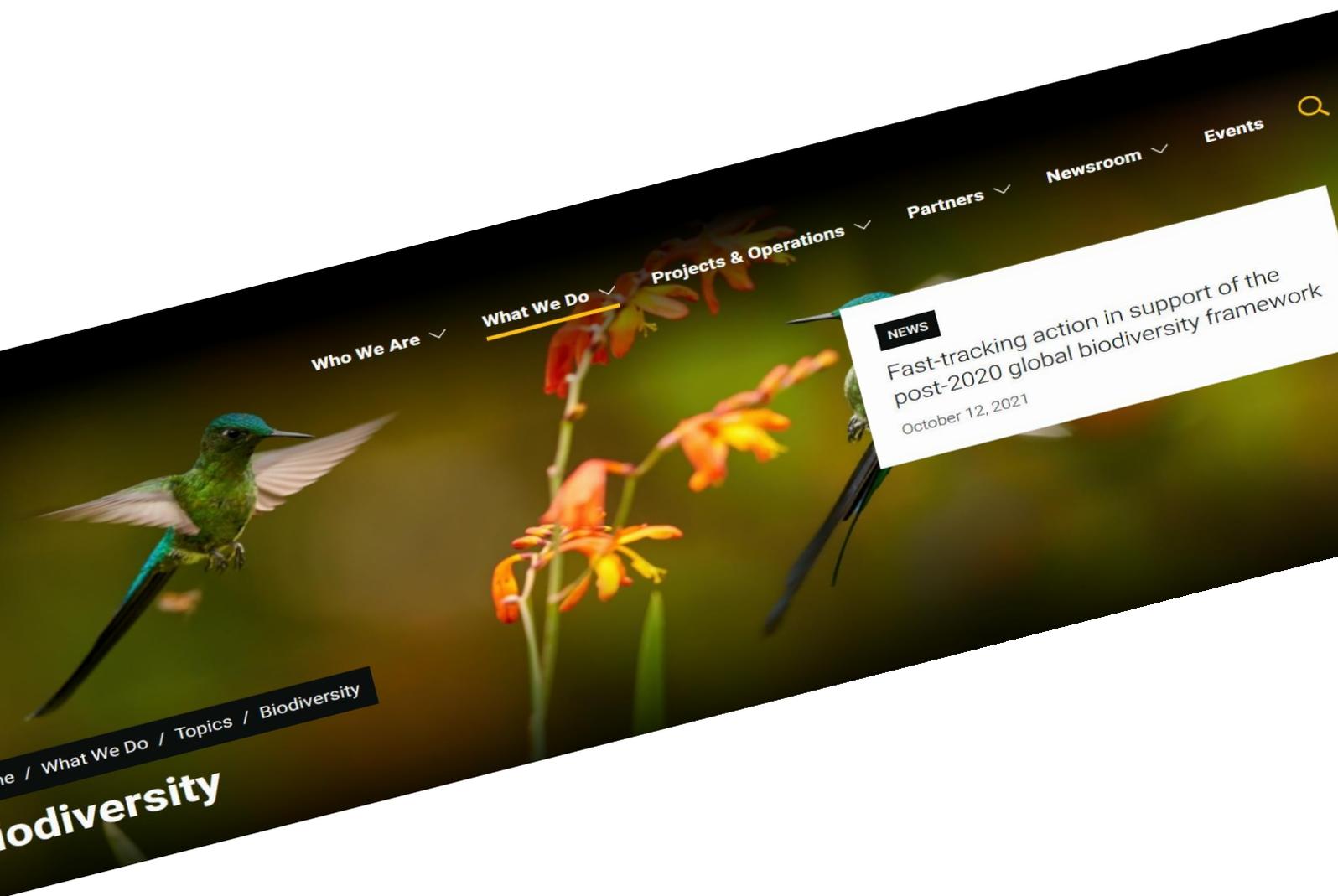
Vol. 1 No. 2

*Berdaya Bersama
Di Tengah Pandemi*

Pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia sejak tahun 2020 turut berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan termasuk implementasi proyek di lapangan. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-18 berdampak pada terbatasnya kegiatan lapangan. Kondisi tersebut menuntut pihak Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan proyek untuk meredefinisi dan meninjau ulang kegiatan-kegiatan agar mampu beradaptasi dengan kondisi Pandemi. Seiring dengan membaiknya penanganan Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, implementasi lapangan dapat kembali bergulir. Berdaya Bersama Di Tengah Pandemi dipilih sebagai tema yang menyatukan rangkaian kegiatan Proyek Combatting Illegal Wildlife Trade (CIWT) sepanjang 2021.



Proyek Combatting Illegal Wildlife Trade (CIWT) mendapat kehormatan terpilih sebagai GEF Good Practices dari Indonesia oleh GEF Secretariat Washington DC dan GEF Focal Point Indonesia.



MUKADIMAH



Upaya menanggulangi dampak buruk perdagangan satwa liar yang tidak berkelanjutan dan ilegal di Indonesia dan Asia Tenggara merupakan tantangan yang ingin ditangani oleh Proyek Combatting Illegal Wildlife Trade (CIWT). Nilai perdagangan satwa liar ilegal di Indonesia diperkirakan bernilai US\$1-miliar per tahun. Perdagangan dan peredaran satwa liar ilegal telah mengakibatkan penurunan dan kepunahan spesies lokal di Asia Tenggara.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang berlimpah ditengarai menjadi salah

satu pemasok satwa liar di Asia baik secara “legal” maupun “ilegal”. Perdagangan satwa liar menjadi ancaman terhadap keberadaan spesies kunci seperti Badak Sumatera, Badak Jawa, Harimau Sumatera, Gajah Asia, dan Trenggiling. Di sisi lain, Indonesia juga menjadi titik transit penting perdagangan satwa liar ilegal dari Afrika ke Asia Timur. Salah satunya perdagangan gading Gajah Afrika. Perburuan, peredaran, dan perdagangan ilegal ini menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan satwa liar.

SELAYANG PANDANG PROYEK CIWT



Mengatasi tantangan yang disampaikan dalam mukadimah, Proyek CIWT yang didanai GEF (*Global Environment Facility*) berusaha untuk menghilangkan hambatan dalam upaya pencapaian solusi jangka panjang yakni melestarikan spesies satwa liar di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan memastikan perdagangan satwa liar yang legal berkelanjutan secara ekologis dan ekonomi sekaligus mengurangi dampak perdagangan satwa liar ilegal baik yang berasal dari Indonesia maupun negara lain.

Satwa liar sendiri sejatinya merupakan sumber daya alam yang jika dieksploitasi secara baik dan berkelanjutan dapat berkontribusi terhadap pembangunan, memberikan pendapatan negara, dan memberi insentif keuangan untuk pengelolaan satwa liar dan ekosistem.

Hambatan utama dalam upaya pencapaian tersebut diantaranya: 1) Kebijakan dan kerangka kerja peraturan yang lemah, informasi, dan alat yang tidak memadai untuk mengatur dan memerangi peredaran satwa liar ilegal; 2) Kapasitas kelembagaan yang kurang optimal dalam rangka pemantauan dan penegakan peraturan; 3) Penegakan hukum yang tidak efektif di tingkat tapak dan lanskap; dan 4) Minimnya

mekanisme berbagi informasi sebagai upaya penanggulangan peredaran satwa liar ilegal.

Hambatan-hambatan tersebut yang berupaya diatasi lewat pelaksanaan proyek ini lewat implementasi 4 (empat) komponen proyek. Komponen 1 (satu) berupaya memperkuat kebijakan nasional, kerangka kerja hukum, dan kelembagaan untuk mengatur perdagangan satwa liar komersial legal dan memerangi perdagangan satwa liar ilegal. Komponen 2 (dua) berupaya untuk memperkuat kapasitas kelembagaan untuk koordinasi peraturan, implementasi dan upaya penegakan hukum di tingkat nasional dan internasional. Komponen 3 (tiga) merupakan strategi penegakan hukum yang lebih baik di pelabuhan-pelabuhan perdagangan utama dan pelabuhan sub-nasional yang terhubung dengan ekosistem utama. Terakhir, Komponen 4 (empat) manajemen pengetahuan yang efektif dalam rangka implementasi dan peningkatan/replikasi pendekatan proyek di tingkat nasional dan internasional serta upaya pengarusutamaan gender.

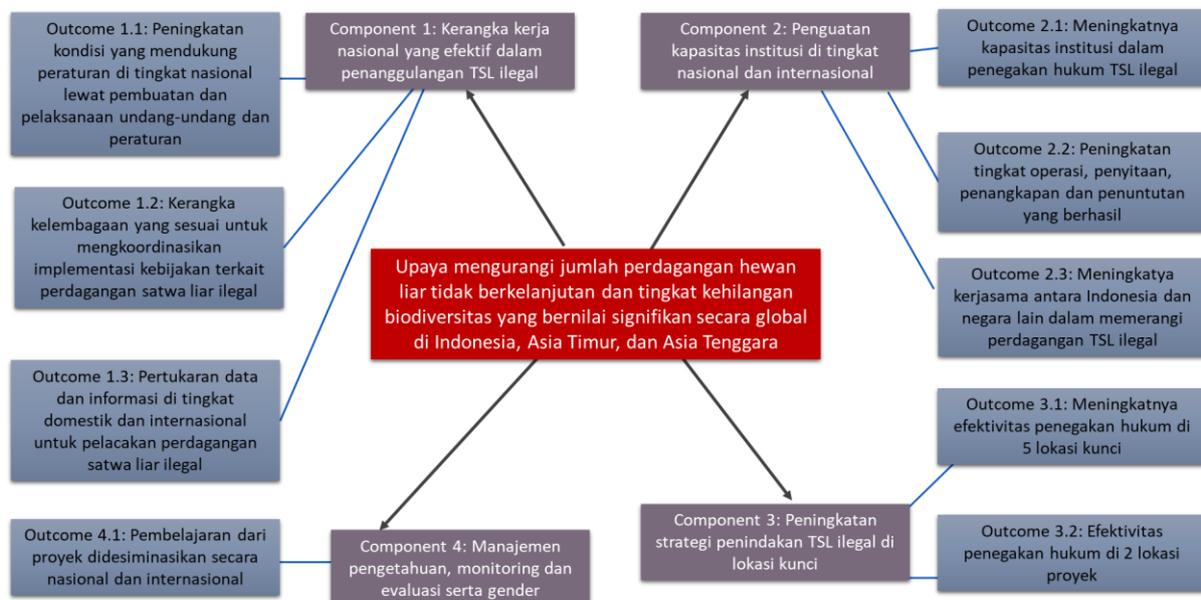
Lewat serangkaian upaya tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan proyek yakni mengurangi volume perdagangan satwa liar yang tidak

berkelanjutan dan menurunkan tingkat kehilangan keanekaragaman hayati yang bernilai signifikan secara

global di Indonesia, Asia Tenggara, dan Asia Timur.

| | |
|-------------------------------|---|
| Proyek | : Combatting Illegal and Unsustainable Trade in Endangered Species in Indonesia (CIWT) |
| Nomor Register | : 24RTXQAA |
| Sumber Dana/ Donor | : Global Environmental Facility (GEF) |
| Jenis Hibah | : Hibah Langsung |
| Executing Agency | : Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Ditjen Gakkum LHK |
| Implementing Agency | : United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia |
| Jangka Waktu | : 7 (tujuh) tahun (2017 – 2023) |
| Lokasi | : Pusat - Daerah (UPT Balai Gakkum LHK) |
| Alokasi Dana | : USD 6,988,853/Rp 94,349,515,500 (kurs Rp 13,500) |
| Tujuan | : Kelestarian dan peningkatan populasi satwa liar dilindungi melalui penurunan perburuan liar dan kejahatan TSL |
| Output yang diharapkan | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kebijakan nasional dan regulasi 2. Penguatan kapasitas dan koordinasi 3. Peningkatan upaya penegakan hukum 4. Penerapan dan penyempurnaan pendekatan proyek pada skala nasional dan internasional |

KOMPONEN PROYEK



IKHTISAR KINERJA 2021



Upaya mengurangi jumlah perdagangan hewan liar tidak berkelanjutan dan tingkat kehilangan biodiversitas yang bernilai signifikan secara global di Indonesia, Asia Timur, dan Asia Tenggara.

0.1 Rekomendasi perbaikan peraturan, legalitas, dan kerangka kerja berkaitan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, serta akses dan pemanfaatan sumber daya alam, keragaman hayati, dan ekosistem

Target pertengahan proyek: Sedikitnya 3 kebijakan dalam pembahasan; kerangka kerja institusi dan kebijakan yang berkaitan dengan pemberantasan TSL ilegal Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun, dan Peraturan Menteri LHK nomor 447 Tahun 2003

Target akhir proyek: setidaknya 2 peraturan/kebijakan disahkan, pasal yang berhubungan dengan pemberantasan TSL ilegal diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Strategi nasional dalam pemberantasan TSL Ilegal tersusun

Capaian:

| Target Proyek | |
|---------------|--------------|
| Pertengahan | Tercapai |
| Akhir | Dalam proses |



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1. Proyek turut berkontribusi dalam proses penyusunan draft regulasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutananan yang berkaitan

dengan Perlindungan Hutan. Pembahasan ini sejalan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan pada November 2020. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 terkait Administrasi Kehutananan sebagai turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 dikeluarkan pada Februari 2021. Proyek turut pula dalam memfasilitasi pembahasan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutananan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Dalam upaya reviu kebijakan terhadap ekosistem regulasi yang berhubungan penanganan pemberantasan perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi, proyek melakukan kajian oleh ahli huku, Harry Alexander SH LLM, terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

Dari hasil kajian gap analisis penegakan hukum dan gap analisis peraturan dari peraturan di bidang Konservasi Hayati Alam Hayati dan Ekosistemnya, peraturan di bidang kehutanan, peraturan di bidang lingkungan hidup, dan peraturan di bidang terkait lainnya beberapa masukan diantaranya: Masih terdapat kesenjangan (gap) dalam peraturan perundang undangan mengenai konservasi (pengawetan)

dan pemanfaatan satwa liar yang dilindungi baik dalam peraturan di bidang Konservasi Hayati Alam Hayati dan Ekosistemnya, peraturan di bidang kehutanan, peraturan di bidang lingkungan hidup, dan peraturan di bidang terkait lainnya. Kemudian pengaturan kelembagaan dalam penegakan hukum perburuan dan perdagangan satwa telah memiliki landasan hukum yang kuat dan pembagian tugas antar kelembagaan.

Perlu ada peningkatan kerjasama dan koordinasi antara kelembagaan khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi.

3. Proses revisi Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor 447 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan Atau Penangkapan Dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar masih terus berproses.

4. Dalam upaya memperoleh pandangan alternatif dari pihak lain terhadap kajian Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Perdagangan Satwa Liar Ilegal (Nastra CIWT) yang telah disusun, Proyek melakukan kajian sejawat (*peer review*) oleh Dr Samedi. Ada beberapa masukan yang

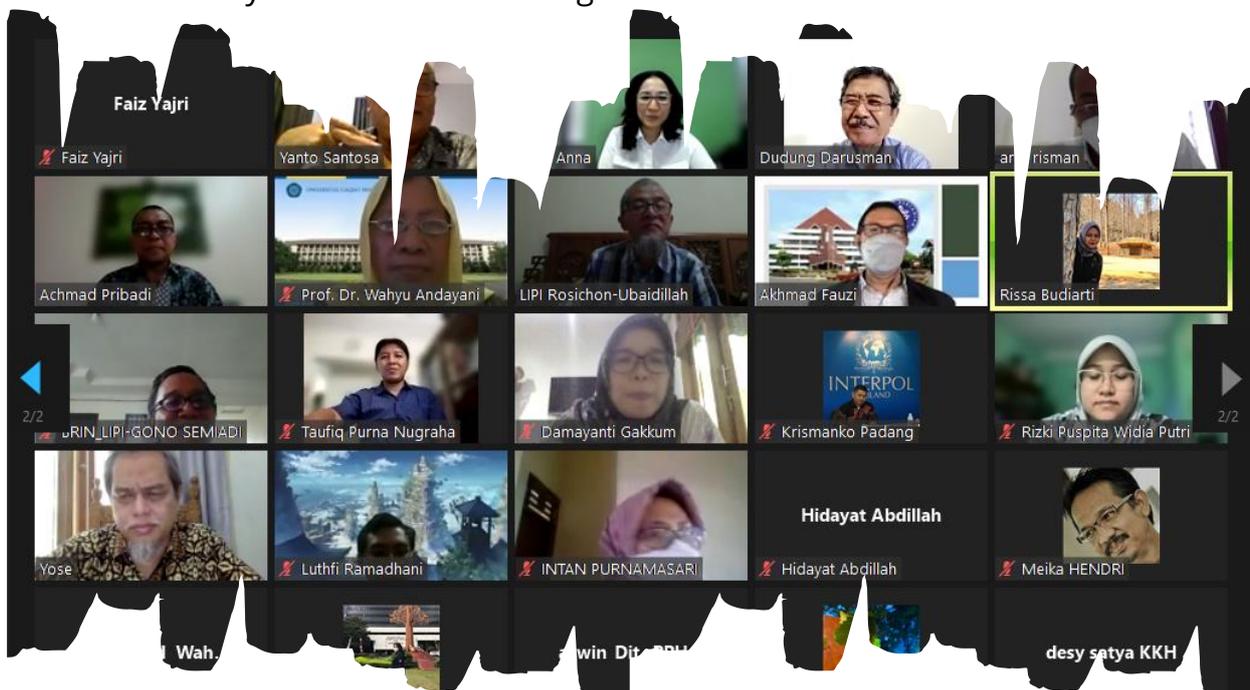


disampaikan oleh mitra bestari terkait draft Nastra CIWT.

5. Senada dengan hal di atas, untuk memperoleh pandangan berimbang terkait dengan Kajian Valuasi Ekonomi Satwa Liar Dilindungi untuk Kepentingan Proses Hukum, proyek melakukan penelaahan sejawat dengan mengundang Prof. Dr. Zuzy Anna, S.Si, M.Si, dari SDG Center Universitas Padjajaran Bandung.

Dalam kerangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap hasil penelaahan mitra bestari dan hasil kajian, proyek mengadakan diskusi kelompok terpumpun (FGD) dengan beberapa ahli diantaranya: Prof. Dr. Ir. Dudung

Darusman, MA dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB); Prof. Dr. Gono Semiadi dari Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); Prof. Drs. Rosichon Ubaidillah, M.Phil, Ph.D dari Pusat Penelitian Biologi, LIPI; Prof. Dr. Ir. Wahyu Andayani, S.U., M.S dari Fakultas Kehutanaan, Universitas Gadjah Mada; Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, dan Dr. R. Taufiq Purna Nugraha dari Pusat Penelitian Biologi, LIPI. Hasil dari FGD tersebut mengaprerasiasi mengenai ikhtiar kajian valuasi ekonomi yang telah dilakukan, pun beberapa catatan perbaikan



0.2 Jumlah penerima manfaat langsung dari proyek:

- Jumlah staf pemerintah termasuk penegak hukum yang memperoleh peningkatan pengetahuan dan kemampuan terkait IWT (laki-laki/perempuan)
- Jumlah warga lokal di lokasi pilot yang memperoleh manfaat dari kegiatan konservasi, pengurangan dampak HWC dan perbaikan penghidupan (laki-laki/perempuan)

Target pertengahan proyek: Setidaknya 1000 personel memperoleh peningkatan pengetahuan terkait IWT (500 laki-laki/500 perempuan)
Setidaknya 300 warga lokal di lokasi proyek memperoleh manfaat langsung dari intervensi proyek (150 laki-laki/150 perempuan)

Target akhir proyek:
Setidaknya 2100 personel memperoleh peningkatan pengetahuan terkait IWT (1050 laki-laki/1050 perempuan)
Setidaknya 600 warga lokal di lokasi proyek memperoleh manfaat langsung dari intervensi proyek (300 laki-laki/300 perempuan)

Capaian:

| Target Proyek | |
|---------------|--------------|
| Pertengahan | Tercapai |
| Akhir | Dalam proses |

a. Sebanyak 1.255 personil pemerintah (999 laki-laki dan 256 perempuan) telah mendapatkan pengetahuan terkait dengan upaya pemberantasan perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi serangkaian pelatihan, diskusi grup terfokus, dan loka latih.

1. Bersama dengan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, proyek turut memfasilitasi Pelatihan Pembentukan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) bagi 57 personil (49 laki-laki dan 8 perempuan). Pelatihan yang

diselenggarakan di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia kembali digelar setelah sempat vakum selama 14 tahun. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr.



Siti Nurbaya Bakar M.Sc, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Rasio Ridho Sani M.Com, M.PM, Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Ir. Sustyo Iriyono M.Sc, dan Kepala Setukpa Brigadir Jenderal Mardiaz Kusin Dwihananto turut hadir dalam pelantikan anggota SPORC. Kehadiran SPORC, menurut Siti Nurbaya, berperan penting dalam upaya memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.

2. Proyek bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone menyelenggarakan loka latih monitoring dan penggalan

informasi dalam rangka pemberantasan peredaran dan perburuan satwa liar dilindungi. Lewat kegiatan ini diharapkan mampu membekali para staf di lingkup Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dengan pengetahuan dan keterampilan teknis terkait upaya penggalan



informasi pemberantasan peredaran dan perburuan satwa liar dilindungi.

3. Penuntutan kasus kejahatan terhadap satwa liar dilindungi tidak hanya secara pidana, namun juga dapat dilakukan secara perdata. Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan bersama Proyek menyelenggarakan pertemuan dalam rangka meningkatkan pengetahuan terhadap kemungkinan penerapan penuntutan perdata terhadap kejahatan satwa liar dilindungi, Sebagai narasumber, Taufiq Purna Nugraha dari Pusat Riset Biologi Badan Riset dan Inovasi Nasional dan praktisi. Pertemuan menyepakati untuk mengidentifikasi

kasus-kasus kejahatan terhadap satwa liar dilindungi menggunakan hukum perdata.

4. Berkolaborasi dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, proyek menginisiasi pembelajaran daring (*e-learning*) dalam meningkatkan pengetahuan terkait upaya pemberantasan perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi. Kegiatan tersebut dihelat sebagai upaya adaptif terhadap kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas dan kegiatan tatap muka.



Ragam pencabut nyawa Harimau Sumatera
Koleksi: BBTNGL



b. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat lokal berkaitan dengan mitigasi konflik dengan hewan liar serta perbaikan mata pencaharian, proyek telah melakukan pelatihan untuk 153 orang (21 perempuan dan 132 laki-laki). Ke depan, di bulan September-Desember 2021, bersama Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dan Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, proyek akan mengadakan serangkaian pelatihan terkait mitigasi konflik satwa serta mata alternatif pencaharian.

1. Perempuan Inspiratif Mitra Polisi Kehutanan (PIMP) menyelenggarakan serangkaian sosialisasi dan pelatihan terkait batik eco-print sebagai salah satu mata pencaharian alternatif bagi warga lokal di seputaran Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya preventif untuk mengurangi perburuan satwa liar dilindungi.

2. Menilik upaya konservasi Harimau Sumatra bertutur tentang pergulatan di batas antara dua kutub: para pelestari dan para pengancam. Konflik antara manusia dengan satwa liar jenis Harimau Sumatra di Balai Taman Nasional Gunung Leuser (BTNGL) cukup tinggi terjadi di awal tahun 2021 yang menimbulkan kerugian materiil (ternak lembu) dan kerugian immateriil (psikologis masyarakat).

Kejadian konflik terbanyak terjadi di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. Beberapa penyebab

terjadinya konflik satwa harimau adalah adanya penggembalaan ternak lembu sampai ke batas kawasan BTNGL serta masih masifnya kegiatan illegal ke dalam kawasan yang mengakibatkan terusiknya satwa Harimau Sumatera dari habitat di dalam/sekitar Kawasan BTNGL serta kawasan hutan dengan fungsi lainnya di penyangga BTNGL.

Kesepakatan Peserta Workshop Mitigasi Konflik dan Perburuan Satwa Liar Harimau Sumatera, membuat rumusan sebagai berikut

Hutan beserta segala isinya adalah kekayaan alam yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Manusia sebagai khalifah bertanggung jawab mempertahankan kelestariannya.

Harimau Sumatera milik kita bersama, bukanlah musuh, melainkan kekayaan hayati yang merupakan ciptaan-Nya dan menjadi kewajiban manusia menjaga keberadaannya dengan berbagi waktu dan ruang dengannya.

DENGAN SEGALA PIKIRAN, TENAGA DAN WAKTU YANG DIMILIKI, BAIK ATAS NAMA PRIBADI MAUPUN DALAM KAPASITAS SEBAGAI BAGIAN DARI INSTITUSI, BERKOMITMEN IKUT BERPERAN AKTIF BAGI KELESTARIAN HUTAN SECARA UMUM DAN KELESTARIAN HARIMAU SUMATERA SECARA KHUSUS

Deli Serdang, 8 Desember 2021

Pih. Kepala Bagian TU BBTNGL

Kepala BPTN Wilayah III Stabat



Kepala Bidang KSDA Wilayah I Kbanjaha

Kepala UPT KPH Wilayah I Stabat



Tingginya potensi dan nilai jual satwa Harimau Sumatera membuat masyarakat secara sadar maupun tidak sadar melakukan tindak pidana Kehutanan yaitu perburuan liar yang juga sebagai dampak konflik satwa yang belum terselesaikan, baik menggunakan senjata api atau senapan angin (kompresor), perangkap atau Jerat yang dipasang di dalam kawasan TNGL.

Dalam upaya meningkatkan pemahaman para pemangku

kepentingan di tingkat tapak dan masyarakat lokal, BTNGL bersama Proyek CIWT menyelenggarakan Loka Laith Mitigasi Konflik dan Perburuan Satwa Liar Harimau Sumatera. Lewat kegiatan ini diharapkan terwujud persamaan persepsi para pihak di tingkat tapak dalam upaya penanganan konflik sesuai dengan aturan dan standar operasional yang telah ditentukan. Hasil dari loka latih ini ini dituangkan dalam nota kesepahaman di antara para pihak.



SPORC dan Momentum Penegakan Hukum

“Saya meminta agar jajaran kehutanan dari mulai tingkat pusat, tingkat daerah, dan tingkat tapak, dapat bekerjasama dengan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) dalam rangka mengawal peraturan perundangan-undangan dan aktif menjaga keamanan hutan dan kawasan hutan”

Dr. Siti Nurbaya Bakar M.Sc

Demikian amanat yang disampaikan Menteri Siti saat menjadi Inspektur Upacara Penutupan Pelatihan SPORC Angkatan Ke-IV Tahun 2021, di Sukabumi, Jawa Barat. Menurut Siti, penguatan SPORC saat ini merupakan momen penting, sejalan dengan makin mantapnya kebijakan sektor kehutanan, yang memerlukan pengawasan dalam operasional implementasinya.

Keberadaan SPORC penting dalam penindakan terhadap pelaku kejahatan di sektor kehutanan. Mereka berupaya mencegah tindakan yang merusak dan mengancam kehidupan masyarakat, ekosistem dan keanekaragaman hayati serta berpotensi melemahkan negara.

Seiring waktu, kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan sangat dinamis, dan akan terus mencari



pola dan bentuk baru. Dalam rangka menghadapi hal tersebut, SPORC harus terus menempa diri dan berinovasi agar tetap mampu mencegah dan menanggulangi berbagai gangguan dan ancaman kejahatan kehutanan yang juga akan meningkat kualitasnya.

Siti menyampaikan, tugas dimaksud tidak akan mudah. Namun dengan sinergitas bersama segenap elemen masyarakat, semua akan bisa diselesaikan, demi hutan lestari dan masyarakat sejahtera.

Dirjen Gakkum LHK Rasio Ridho Sani menyatakan tantangan dalam penegakan hukum LHK semakin berat dengan berbagai macam modus kejahatan LHK. Dengan dilantiknya 57 anggota SPORC akan meningkatkan kualitas dan kuantitas penegak hukum LHK di lapangan.

"Setelah pelantikan 57 anggota SPORC ini, sebagian akan ditingkatkan kemampuannya dengan diklat intelijen, diklat penyidikan, diklat penginderaan jauh serta peningkatan penguasaan teknologi dalam pemberantasan kejahatan LHK," tutur Rasio Sani.

SPORC dibentuk pada tanggal 4 Januari 2005 sebagai salah satu satuan khusus yang handal, professional, mempunyai mobilitas tinggi dalam penanganan gangguan pengamanan hutan. Saat ini, jumlah brigade berjumlah 16 brigade dengan total personel 499 yang berada pada brigade SPORC seluruh Indonesia. Seluruh brigade telah berperan aktif dalam penanggulangan dan penanganan tindak pidana kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pada tahun 2015 sampai dengan sekarang, SPORC telah berkontribusi terhadap 653 Operasi pengamanan hutan, 671 operasi illegal logging, 416 Operasi perdagangan TSL, 592 kasus P21 kasus illegal logging, 333 kasus P21 TSL, 156 kasus P21 perambahan hutan, 32 kasus P21 pencemaran LH, 12 kasus P21 karhutla, dan 14 kasus P21 kerusakan lingkungan.



0.3 Evaluasi ahli terkait volume tahunan IWT (jumlah spesimen hewan-bagian tubuh atau hidupan) di Indonesia berdasar data IWT WCS

Target pertengahan proyek: Meningkatkan jumlah penuntutan kasus

Target akhir proyek: Meningkatkan jumlah kasus terselesaikan

Capaian:

| Target Proyek | |
|---------------|----------|
| Pertengahan | Tercapai |
| Akhir | Tercapai |

Berdasarkan data Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Gakkum LHK, Kementerian LHK, menunjukkan jumlah penuntutan dan kasus

terselesaikan yang berhubungan dengan pemberantasan satwa liar ilegal pada tahun 2020 mencapai 48 kasus.

0.4 Jumlah individu spesies kunci IWT (Harimau sumatera, badak sumatera, gajah sumatera, monyet yaki, anoa, dan babi rusa) yang diburu setiap tahun di 2 lokasi proyek.

Data dasar: 2015 harimau (5), gajah (7) badak (1) anoa (10) babi rusa (12) monyet yaki (200)

Target pertengahan proyek > pengurangan 20% dari data dasar

Target akhir proyek > pengurangan 40% dari data dasar

Capaian:

| Target Proyek | |
|---------------|--------------|
| Pertengahan | Dalam proses |
| Akhir | Dalam proses |

Sebagai ikhtiar untuk mengurangi ancaman terhadap perburuan dan peredaran satwa liar dilindungi, bersama dengan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, proyek turut mendukung

serangkaian operasi pemberantasan perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Barat, Riau, dan Sulawesi Utara.



Rangkaian operasi tersebut digelar bekerja sama bersama dengan penegak hukum lain. Sebut saja Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem setempat.

Pun, dalam upaya untuk mengurangi penyelundupan satwa liar dilindungi antar pulau, pihak proyek memfasilitasi kegiatan cek poin di Pelabuhan Bakauhenuni, Lampung.

Pelabuhan Bakauheui disinyalir menjadi pintu gerbang penyelundupan satwa liar dilindungi, terutama jenis burung, dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Dalam kaitan pencegahan penyelundupan antar negara, proyek juga turut memfasilitasi pelaksanaan kegiatan persiapan cek poin peredaran satwa liar dan tumbuhan di 3 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yakni Aruk, Entikong, dan Badau. Ketiganya berada di Provinsi Kalimantan Barat.



Kerangka kerja nasional efektif terkait penanganan perdagangan IWT. Penguatan kebijakan nasional, kerangka kerja institusi dan hukum untuk pengaturan perdagangan komersial ilegal satwa liar dan penanggulangan perdagangan IWT

1.1 Kesenjangan legislasi diperbaiki lewat kebijakan IWT yang disetujui pemerintah berupa:

- Denda dan hukuman minimum bertambah untuk menambah efek jera
- Spesies non-asli terancam seperti gajah, badak, kucing besar dan trenggiling memperoleh perlindungan legal
- Pemutakhiran daftar spesies dilindungi Indonesia untuk mengadkomodasi seluruh Appendix I CITES serta spesies terancam punah secara global
 - Kewenangan petugas penyelidik kehutanan sipil diperbaiki
- Evaluasi penahanan/penjara untuk menciptakan efek jera dan rehabilitasi para pelaku
- Regulasi perdagangan daring dalam upaya menanggulangi perdagangan IWT secara daring.

Target pertengahan proyek: Jumlah minimum denda meningkat 25%; rata-rata vonis penjara meningkat 10% dibanding data dasar; Termutakhirkannya daftar spesies dilindungi Indonesia untuk mengadkomodasi seluruh Apppendiks I CITES serta spesies terancam punah secara global

Target akhir proyek: Seluruh kesenjangan kunci yang berhubungan dengan legislasi terselesaikan

Capaian:

| Target Proyek | |
|---------------|--------------|
| Pertengahan | Dalam proses |
| Akhir | Dalam proses |

1. Berkenaan dengan CITES, proyek turut memfasilitasi pertemuan dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan CITES dan Laporan Perdagangan Ilegal CITES. Hal tersebut menindak-lanjuti pertemuan terkait pengumpulan data tahunan CITES dengan

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik selaku MA CITES Indonesia dalam kerangka sinergitas data. Proyek juga memfasilitasi rangkaian pertemuan dalam rangka persiapan The Sixteenth Meeting

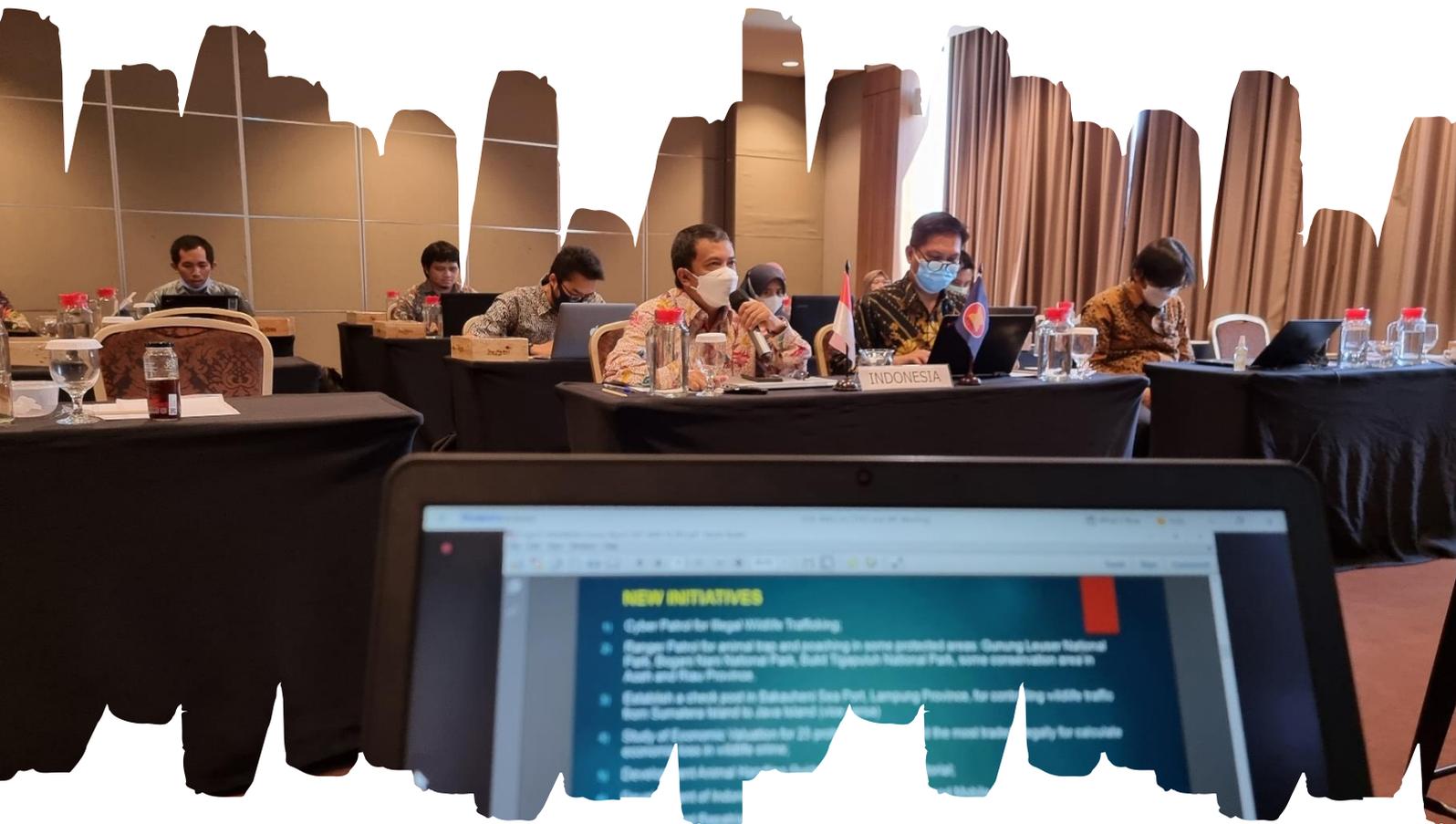
of The ASEAN Working Group on The Convention on International Trade in Endangered Species on Wild Fauna

2. Dalam rangka mengukuhkan pembentukan Peyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pihak proyek bersama Direktorat Penegakan Hukum Pidana meyelenggarakan pertemuan guna membahas pembentukan jabatan fungsional PPNS bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pertemuan pun tidak luput pula membahas butir-butir kegiatan jabatan fungsional PPNS bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan narasumber dari

and Flora and Wildlife Enforcement (16th AWG-CITES AND WE).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan RB) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham).

3. Revolusi Industri 4.0 telah “mengetuk” pintu keseharian dan menghentak seluruh aspek kehidupan kita. Berdasar data yang dilansir We Social (2021) pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6-juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak 271,34-juta jiwa, artinya penetrasi internet mencapai 75%.



Tingkat konektivitas ini telah mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, memperoleh dan mengakses informasi, serta bagaimana cara kita melihat dunia. Termasuk dengan perdagangan satwa liar dilindungi.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama dengan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan

menemukan 1.554 akun dan 2.262 unggahan terkait perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar dilindungi.

4. Sebagai bagian dalam upaya tindak lanjut hasil patrol siber, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan bersama dengan proyek, menginisiasi pertemuan dengan Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Badan Reserse dan Kriminal, Kepolisian



Hutan, dalam rangka meningkatkan pengelolaan patrol siber yang telah dirintis, proyek memfasilitasi pertemuan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan desain proses bisnis Unit Patroli Siber. Hingga Juli 2021, hasil patrol siber

Republik Indonesia, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pertemuan menyepakati untuk dilakukan kerja sama dalam upaya penanganan kejahatan daring terhadap peredaran dan perdagangan satwa liar dilindungi.

1.2 Gugus kerja antar lembaga terbentuk dan beroperasi sesuai dengan tujuannya ditandai dengan penanda-tanganan kerjasama antar lembaga terkait IWT

Target pertengahan proyek: Terbentuk dan beroperasinya 1 gugus kerja antar lembaga, 1 perjanjian kolaborasi antar lembaga

Target akhir proyek: Beroperasinya gugus kerja antar lembaga, 1 perjanjian formal kolaborasi antar lembaga

Capaian:

| Target Proyek | |
|---------------|----------|
| Pertengahan | Tercapai |
| Akhir | Tercapai |

Tercapainya target akhir proyek, tidak menyurutkan langkah proyek dalam menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait dalam upaya pemberantasan perburuan dan perdagangan illegal satwa liar dilindungi. Proyek turut mendukung pembahasan kerja sama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Badan Karantina Pertanian,

Kementerian Pertanian terkait penegakan hukum di bidang tumbuhan dan satwa liar (TSL) dilindungi.

Di ujung utara gugusan Pulau Sulawesi, proyek bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara dan Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi III Sulawesi Utara dan Satuan

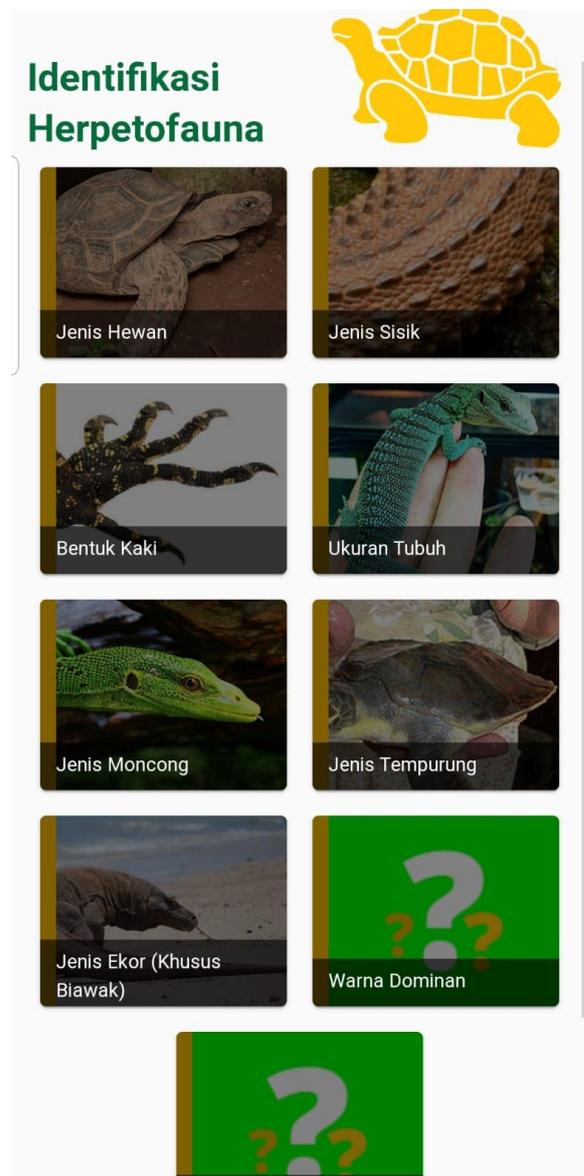


peredaran dan peredaran tumbuhan dan satwa liar dilindungi serta rencana rangkaian operasi bersama.

Nun di Suwarnadipa alias Pulau Sumatera, proyek bersama dengan Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera menginisiasi 2 (dua) pertemuan koordinasi dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar illegal di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Kedua pertemuan tersebut dihadiri oleh para pemangku kepentingan di antaranya: Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Kepolisian Daerah, Badan Karantina, Bea Cukai, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kejaksaan Tinggi, serta pengelola Taman Nasional. Nota kesepahaman di antara para pihak di kedua lokasi berhasil diinisiasi sebagai langkah awal upaya penegakan hukum terhadap peredaran dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal.

Dukungan lain terhadap upaya pemberantasan perdagangan satwa liar dilindungi turut bergulir dengan hadirnya aplikasi identifikasi satwa liar dilindungi. Aplikasi ini telah memasuki tahap beta. Guna menguji kehandalan dari aplikasi, proyek memfasilitasi pertemuan uji coba

dengan para pemangku kepentingan di antaranya: Kepolisian Republik Indonesia, Badan Karantina, Bea Cukai serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dari hasil pertemuan, aplikasi ini memperoleh sambutan positif. Para pemangku kepentingan pun sepakat untuk kerja sama lebih lanjut dalam upaya pemanfaatan dan pengembangan basis data agar lebih lengkap dan semakin handal.



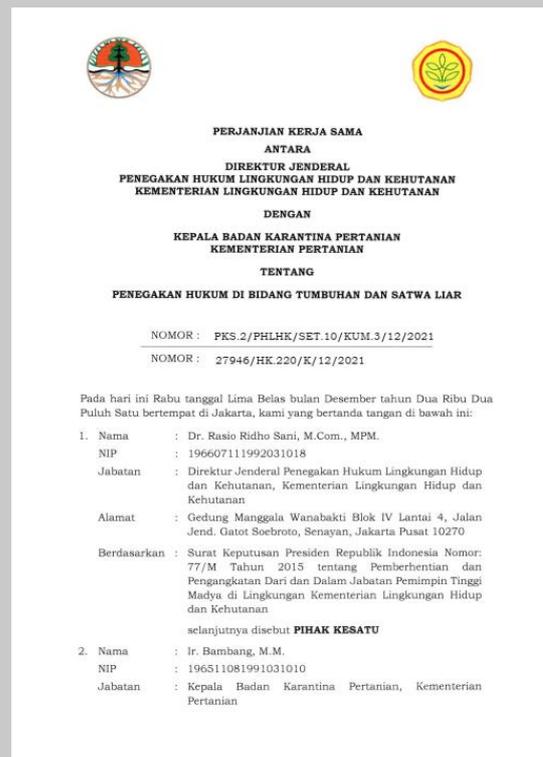
Sinergi untuk Negeri

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian sepakat menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penegakan Hukum di Bidang Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dilindungi.

Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani pada saat penandatanganan PKS menyampaikan bahwa maksud dari PKS ini sebagai upaya bersama bagi para pihak untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam penegakan hukum di bidang tumbuhan dan satwa liar serta bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan penegakan hukum di bidang TSL.

Menurut Rasio, salah satu titik penting dalam upaya penanggulangan kejahatan perdagangan ilegal TSL dengan jalan meningkatkan upaya penegakan hukum di pintu-pintu masuk dan keluar baik antar pulau maupun antar negara seperti pelabuhan, bandara, dan perbatasan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Gakkum LHK merasa perlu membangun jejaring kerja sama dan sinergi dengan instansi penegak hukum lain, salah satunya Badan Karantina Pertanian

yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa di Indonesia khususnya di area bandara, Pelabuhan, dan perbatasan.



Hal senada diungkapkan Kepala Badan Karantina Pertanian, Bambang, yang menyebut terdapat koneksitas antara kehutanan dengan pertanian. Menurutnya, sektor kehutanan adalah bank dari pertanian, Badan Karantina Pertanian mendukung penuh penegakan hukum tumbuhan dan satwa liar.

Bambang menuturkan, dalam rangka penegakan hukum tersebut, perlu dibangun kerja sama sehingga upaya penegakan hukum di bidang tumbuhan dan satwa liar dapat terlaksana. Bambang mengungkapkan akan menyediakan seluruh personel unit pelaksana teknis yang dimiliki Badan Karantina Pertanian selama dibutuhkan Gakkum KLHK dalam proses penegakan hukum bidang TSL.

Usai penandatanganan PKS ini, akan ditindaklanjuti dengan kegiatan penegakan hukum bersama baik dengan pertukaran informasi, pencegahan, pengamanan hingga upaya penyidikan sehingga pelaksanaan kewenangan tugas dan fungsi Ditjen Gakkum LHK dan Badan Karantina Pertanian dalam menangani kejahatan bidang TSL akan lebih komprehensif, sinergis, dan profesional.



Peningkatan kapasitas untuk implementasi dan penguatan penegakan hukum untuk level nasional dan internasional. Penguatan kapasitas institusi untuk koordinasi regulasi, implementasi, dan penguatan penegakan hukum pada tingkat nasional dan internasional

2.1: Penguatan kapasitas institusi dalam memerangi IWT sebagaimana dinyatakan dalam:

Kerangka kerja indikator ICCWC (data dasar ditentukan di tahun 1)

Kartu Skor Perkembangan Kapasitas UNDP untuk Gakkum

Status operasional Sistem Informasi Gakkum

Data Dasar: ICCWC Indicator Framework-TBD, Skor Pengembangan Kapasitas: 60%, Database operasional gakkum

Target Pertengahan Proyek: Tercapainya skor pengembangan kapasitas 70%, Pemberlakuan perjanjian pertukaran data di antara lembaga pemerintah

Target Akhir Proyek: Skor pengembangan kapasitas 80%, Sistem informasi telah berjalan dan ditangani staf terlatih

Capaian:

| Target Proyek | |
|---------------|----------|
| Pertengahan | Tercapai |
| Akhir | Tercapai |

1. Sebagai bagian dari upaya penilaian kapasitas institusi dalam upaya pemberantasan peredaran dan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama proyek mengadakan diskusi terfokus Pemutakhiran Skor Pengembangan Kapasitas Direktorat Jenderal Gakkum LHK dalam pemberantasan perburuan dan peredaran satwa liar ilegal. Kegiatan ini menindaklanjuti kegiatan tahun sebelumnya dalam upaya pemutakhiran skor. Hasilnya, pada 2021 diperoleh skor sebesar 83. Jumlah itu meningkat dibanding skor serupa pada 2020 yang bertengger di angka 76. Berdasarkan skor yang diperoleh pada 2021, angka yang diperoleh sudah melebihi target akhir proyek sebesar 80 poin. Dalam upaya mempertahankan skor akhir, disepakati perlunya

upaya-upaya kegiatan yang relevan agar pencapaian skor dapat dipertahankan dan diharapkan dapat terus mengalami peningkatan.

2. Senafas dalam upaya peningkatan kapasitas di atas, terutama yang berhubungan dengan Sistem Informasi Ditjen Gakkum LHK, proyek memfasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas yang ditujukan kepada para pengelola Operation Room di tingkat pusat serta di daerah yakni di Palembang, Sumatera Selatan; Pekanbaru, Riau, serta Surabaya, Jawa Timur. Dalam acara yang turut pula dihadiri Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani, pelatihan menyorot topik yang berhubungan dengan proses bisnis dan



SOP Operation Room, ArcGIS, Forensik Digital, Data Mining, serta *Intelligence Media Analytics*. Pelatihan ini menggenapi sumbangsih proyek dalam pembangunan Operation Room di Pekanbaru, Riau dan Surabaya, Jawa Timur.

3. Dalam rangka pemetaan data dan kompetensi anggota Polisi Kehutanan yang berada di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan bersama proyek menyusun sistem pangkalan data Polisi Kehutanan.

4. Sementara itu terkait dengan reviu kerangka kerja International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICWC Framework) telah rampung dilaksanakan oleh

konsultan Harry Alexander, S.H, LLM. Hasilnya, pengaturan dan pelaksanaan ICCWC Indicator Framework dalam perubahan peraturan perundang undangan dan penegakan hukum telah dilakukan secara *Largely Compliance* alias telah memenuhi standar, walaupun demikian perlu beberapa penguatan dalam peraturan perundang undangan.

2.2: Jumlah tahunan penahanan; Jumlah tahunan penuntutan berhasil

Data dasar: Dari pertengahan 2015-pertengahan 2016 WCU memfasilitasi operasi penenganan hukum untuk 31 kasus dimana 55 orang ditahan dan dituntut ke pengadilan. Sebanyak 41 dituntut (100% tuntutan). Untuk spesies kunci di daratan Sumatera dan Jawa.

| |
|---|
| Target Pertengahan Proyek: Peningkatan 10% dalam penangkapan dari data dasar, Sebanyak 50% kasus masuk penuntutan |
| Target Akhir Proyek: Peningkatan 25% dalam penangkapan dari data dasar, Sebanyak 75% kasus masuk tahap penuntutan |

Capaian:

| Target Proyek | |
|---------------|----------|
| Pertengahan | Tercapai |
| Akhir | Tercapai |

Berdasarkan data yang dikeluarkan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, pada 2020, terdapat 48 kasus penangkapan dan

penuntutan yang berhubungan dengan kegiatan perburuan dan peredaran satwa liar dilindungi.

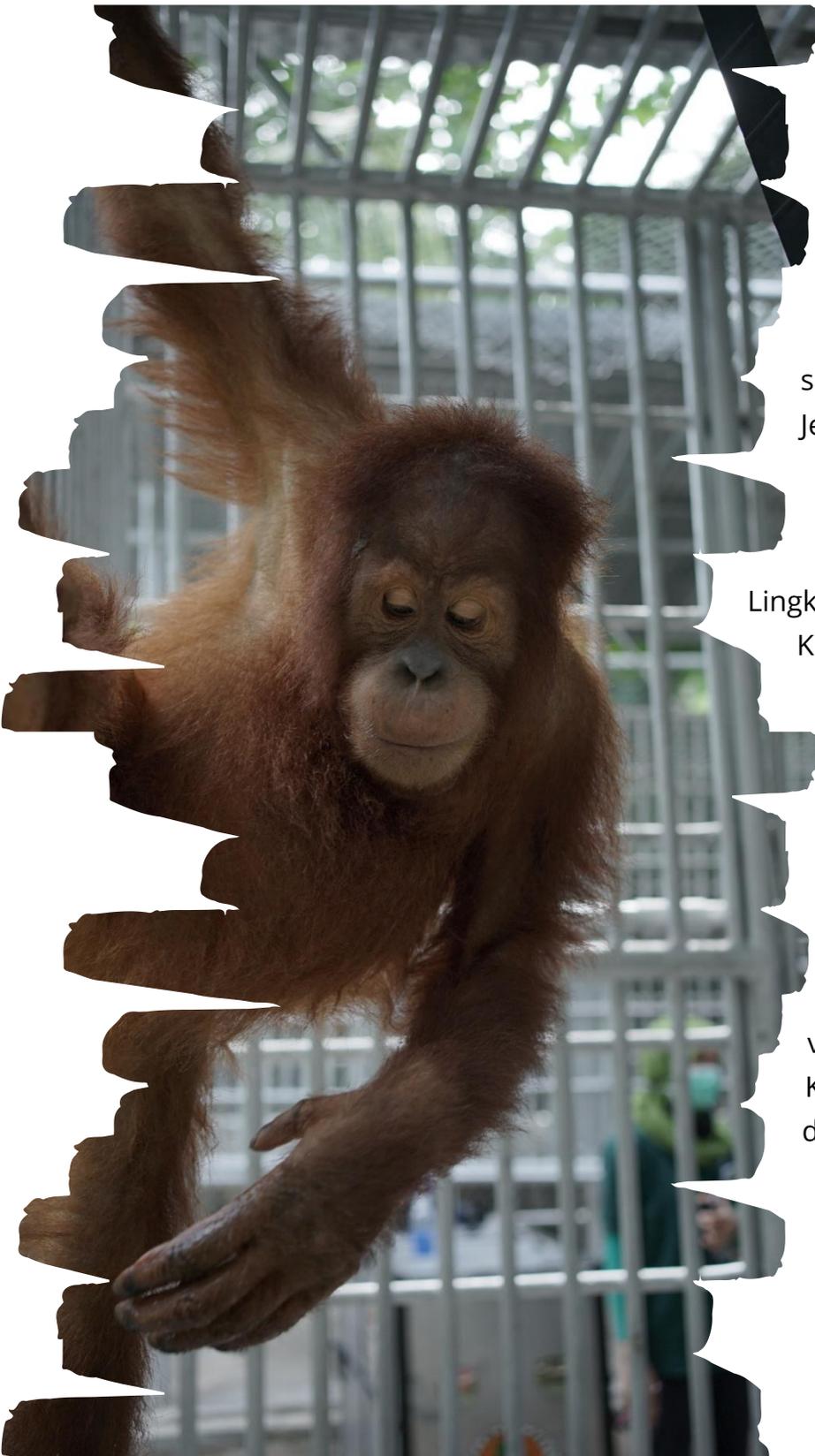
2.3: Jumlah tahunan operasi transnasional gabungan terkait IW; Jumlah tahunan penangkapan sebagai hasil operasi transnasional gabungan terkait IWT

Data dasar: Tidak ada operasi transnasional

| |
|--|
| Target pertengahan proyek: 1 operasi/penangkapan transnasional |
| Target akhir proyek: 3 operasi/penangkapan transnasional |

Capaian:

| Target Proyek | |
|---------------|----------|
| Pertengahan | Tercapai |
| Akhir | Tercapai |



Di tengah deraan pandemi Covid-19, proyek bekerja sama dengan para pihak memulangkan kembali ke tanah air 9 orang utan dari Malaysia dan 2 orang utan dari Thailand. Pemulangan tersebut terlaksana berkat kerja sama apik antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia dan Thailand, serta Garuda Indonesia. Proses pemulangan orang utan memperoleh liputan lebih dari 40 media daring dari dalam dan luar Indonesia serta turut disiarkan via akun media sosial resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peningkatan strategi pelaksanaan penegakan hukum di pelabuhan kunci dan ekosistem yang terhubung. Strategi pelaksanaan penegakan hukum diperbaiki serta ditingkatkan di pelabuhan kunci serta wilayah yang terhubung dengan ekosistem kunci

3.1: Efektivitas penegakan hukum di 5 pelabuhan kunci (Jakarta, Surabaya, Bitung, Belawan, dan Bandara Kualanamu) yang dinyatakan lewat: Penilaian skor PortMate (rata-rata skor untuk KSDA, Bea Cukai, Pengelola Pelabuhan di masing-masing pelabuhan)

Data dasar: PortMATE Baseline scores: Surabaya (Tanjung Perak Perak):17; Belawan: 18.67, (Jakarta, Bitung and Kualanamu ditentukan kemudian)

Target pertengahan proyek: Peningkatan 25% dari data dasar

Target akhir proyek: Peningkatan 50% dari data dasar

Capaian:

| Target Proyek | |
|---------------|--------------|
| Pertengahan | Dalam proses |
| Akhir | Dalam proses |

Proyek telah melakukan pertemuan koordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas (KSOP) Bitung dan sepakat untuk melakukan pemutahiran data Portmate di awal

tahun 2022. Untuk lokasi lain, proyek berencana melakukan pemutakhiran data setelah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di awal tahun 2022.



3.2: Penegakan hukum efektif di dua lokasi yang termasuk rute perdagangan signifikan IWT: Jumlah tahunan penangkapan terkait IWT di lokasi proyek; Jumlah tahunan investigasi IWT yang berujung pada penahanan di lokasi proyek; Jumlah tahunan penuntutan yang berhasil terkait IWT di lokasi proyek

Data dasar: Sebanyak 4666 hewan liar diamankan dari 34 spesies dilindungi

| |
|---|
| Target Pertengahan Proyek: Peningkatan angka kasus penuntutan (10%) |
| Target Akhir Proyek: Peningkatan angka penyelesaian kasus (%) |

Capaian:

| Target Proyek | |
|---------------|----------|
| Pertengahan | Tercapai |
| Akhir | Tercapai |

Merujuk data yang dikeluarkan Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, pada 2020 terdapat 48 kasus penangkapan dan penuntutan.



Pengelolaan pengetahuan, pengarus-utamaan gender serta monitoring dan evaluasi. Implementasi dan replikasi/peningkatan pendekatan proyek di tingkat nasional didukung oleh pengelolaan pengetahuan yang efektif dan pengarus-utamaan gender

4.1: Jumlah pembelajaran proyek yang didokumentasikan dan dimanfaatkan oleh proyek nasional atau internasional lain.

Data dasar: Tidak ada

Target Pertengahan Proyek: Sedikitnya 3 pembelajaran proyek digunakan oleh proyek nasional atau internasional lain.

Target Akhir Proyek: Sedikitnya 5 pembelajaran proyek digunakan oleh proyek nasional atau internasional lain.

Capaian:

| Target Proyek | |
|---------------|--------------|
| Pertengahan | Tercapai |
| Akhir | Dalam proses |

1. Proyek Combatting Illegal Wildlife Trade (CIWT) bekerja sama dengan Laboratorium Pengelolaan Satwa Liar Universitas Gadjah Mada berusaha untuk mengumpulkan ilmuwan, pembuat kebijakan, komunitas lokal, institusi akademik, organisasi konservasi, praktisi, dan semua pemangku kepentingan terkait lainnya di seluruh dunia dalam sebuah serial seminar internasional WECMIC (Wildlife Ecology, Conservation and Management International Conference) yang bertajuk "The First International Conference on Wildlife Ecology,

Conservation and Management; Human-Wildlife Interface in the Tropics: current and future challenges".

Kegiatan Seminar Internasional WECMIC dimaksudkan sebagai upaya menghadirkan pelbagai riset dan praktik terkini yang berhubungan dengan konservasi dan pengelolaan satwa liar termasuk dalam upaya pemberantasan perburuan dan perdagangan satwa liar domestik dan internasional, manajemen konflik manusia dan satwa liar, status kegiatan penelitian dan konservasi, perkembangan teknologi dan

penerapannya di dalam kegiatan penelitian, konservasi dan pengelolaan satwa liar, serta peran konservasi ex-situ dalam pencegahan kepunahan satwa liar.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Alue Dohong saat membuka WECMIC 2021 menyatakan

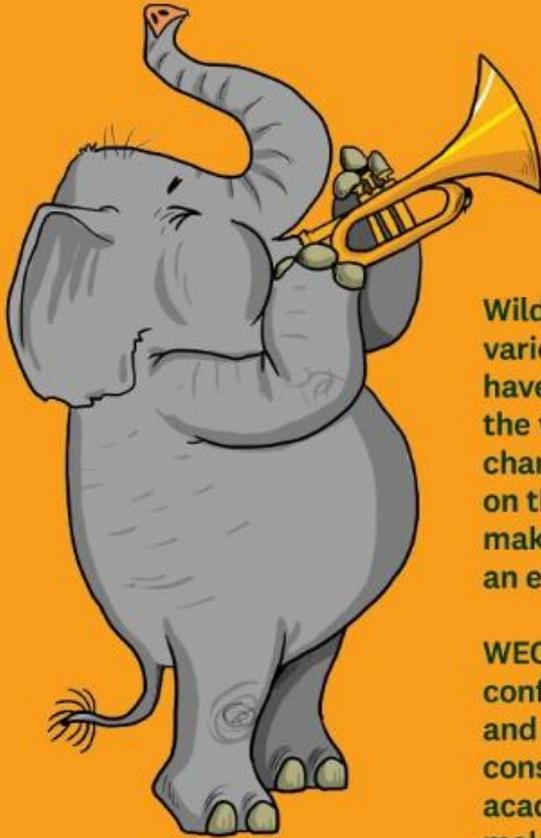
diskusi, penelitian, dan upaya konservasi yang saling bersinggungan perlu mendapat perhatian yang mendalam. Hal ini tidak terlepas dari peran penting satwa dalam sistem rantai kehidupan. Hilangnya sejumlah spesies satwa, berarti akan ada rantai kehidupan yang terputus.



“Human - Wildlife Interface in the Tropics: Current and Future Challenges”

INDONESIA, NOVEMBER 2021

Call for Paper



Wildlife in the tropics has faced various threats for decades which have driven many species to the verge of extinction. Climate change has added to the pressure on these wildlife populations, making conservation in the tropics an even more urgent agenda.

WECMIC 2021 is an international conference that discusses updates and developments in wildlife conservation with prominent academics, practitioners, policy makers, and wildlife conservation enthusiasts at large.

We are inviting all wildlife conservation warriors to join the conference and submit papers. Share your knowledge, expertise, and experience with fellow wildlife conservation enthusiasts in this international conference.

LET YOUR KNOWLEDGE AND EXPERIENCE BE SHARED, HEARD, AND PRACTICED!

For detailed information on paper submission go to
<https://wecmic.id/>

IMPORTANT DATES

30 September Abstract Submission Deadline

7 October Notification of Selected Abstracts

15 October Paper/Poster Submission Deadline

If you are

Students, wildlife manager, ranger, veterinarian, captive breeder, forester, conservation biologist, ecologist, mathematician, ICT developer, wildlife conservation enthusiast, policy maker.

We encourage you to send your abstract and paper as soon as possible.

Submission Guideline

1. Abstracts are to be written in English.
2. The title of the abstract should be written in compact, clear, and informative sentences, preferably not more than 20 words.
3. The abstract should be informative and state briefly the rationale and the aim of the research, the principal results and major conclusions, maximal 200 words.
4. Manuscripts will be reviewed by editors and invited reviewers (double blind review) according to their disciplines.

Scan Here!



Hosted by:



Supported by:



PERSPECTIVA

2. Menyimak besarnya penetrasi media sosial menyeruak dalam struktur populasi dan ranah keseharian penduduk Indonesia, pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi menjadi sebuah keniscayaan. Termasuk dalam upaya mengkomunikasikan pesan terkait

Indonesia turut pula memanfaatkan saluran media sosial sebagai sarana komunikasi dan kampanye. Saluran komunikasi melalui Twitter, Instagram, Facebook, serta laman menjadi saluran mengkomunikasikan kinerja dan pesan terkait pemberantasan dan perdagangan



upaya pemberantasan peredaran dan perdagangan ilegal satwa liar.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) LHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai salah satu pihak yang diberi mandat dalam upaya pemberantasan peredaran dan perdagangan ilegal satwa liar di

satwa liar.

Dalam upaya mengemas penyampaian pesan yang ditujukan kepada khalayak melalui media sosial, diperlukan adanya foto ataupun video yang berkualitas serta mempunyai nilai berita. Di tengah populernya pemanfaatan media sosial saat ini, foto dan video yang

mampu menarik perhatian khalayak menjadi salah satu hal penting di tengah gempuran informasi yang membunyah di media sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut proyek turut memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas kepada para pengelola media sosial di lingkup Ditjen Gakkum KLHK dalam bidang video dan foto terutama sebagai upaya dokumentasi dan pengemasan pesan terkait pemberantasan perburuan, peredaran, dan perdagangan satwa liar dilindungi. Pelatihan

3. Balai Taman Nasional Gunung Leuser (BTNGL) bersama dengan proyek memfasilitasi pelatihan pembentukan Perempuan Inspiratif Mitra Polisi Kehutanan (PIMP) sebagai bagian dari upaya pelibatan perempuan dalam pemberantasan perburuan dan peredaran satwa liar dilindungi di lingkup Taman Nasional Gunung Leuser. Kegiatan ini merupakan replikasi dari kegiatan serupa yang telah dihelat di Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara dan Manado, Sulawesi Utara menghadirkan praktisi yang mumpuni di bidangnya. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pengelola media sosial lingkup Ditjen Gakkum LHK di tingkat nasional dan daerah. Penyelenggaraan pelatihan ini untuk melengkapi Norma, Standar, Peraturan, dan Ketentuan (NSPK) terkait media sosial di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga turut difasilitasi oleh proyek.

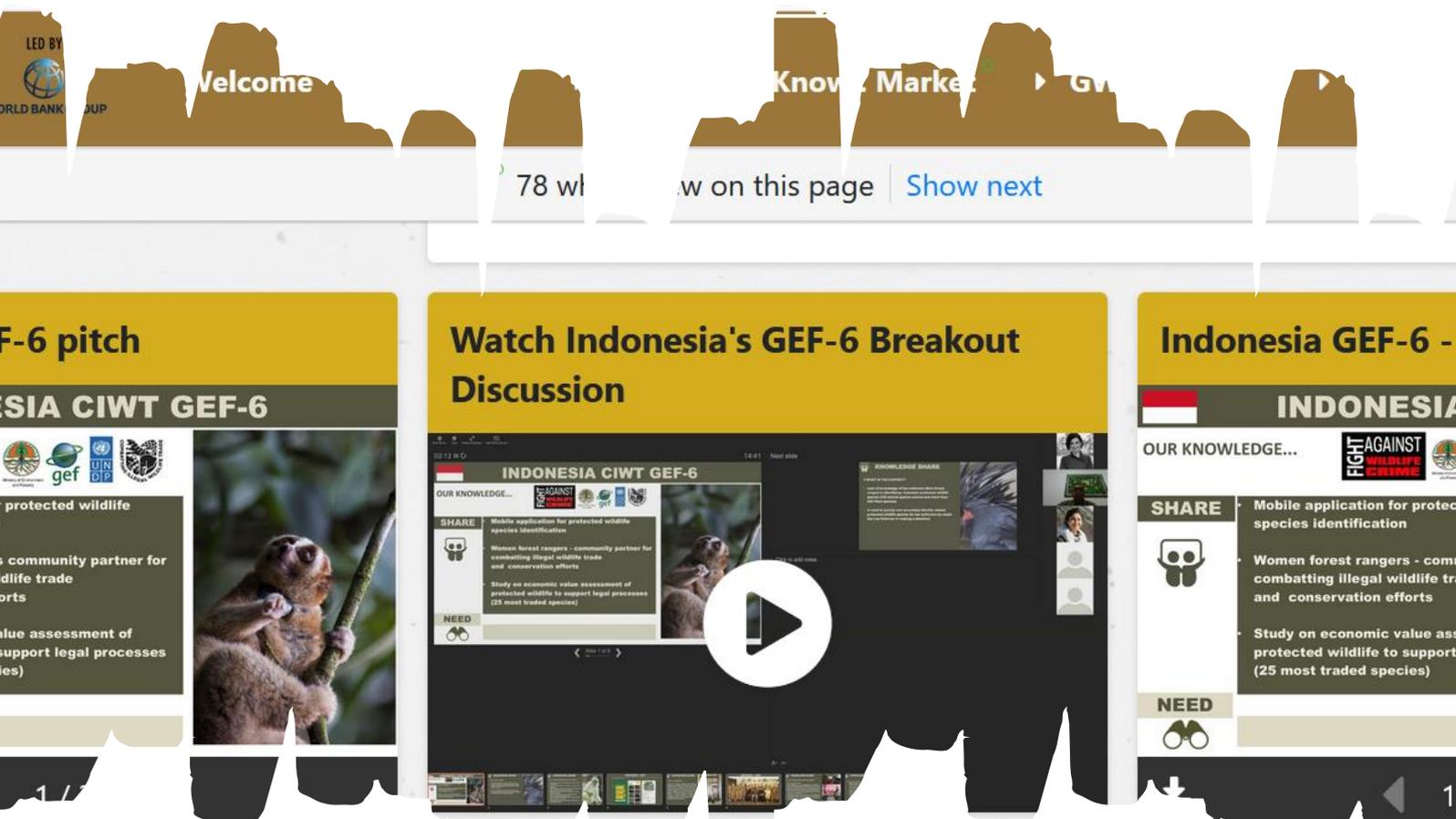
4. Dalam rangka kampanye internasional the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence, proyek bersama UNDP Indonesia menerbitkan artikel terkait Perempuan Inspiratif Mitra Polisi Kehutanan (PIMP) sebagai penjaga



kelestarian ekosistem di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

5. Sehubungan dengan penyusunan strategi komunikasi dalam upaya pemberantasan perburuan dan peredaran satwa liar dilindungi, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia telah dipilih untuk menyelenggarakan survei nasional Knowledge, Attitude, and Practice (KAP). Saat ini proses survei dalam tahap pengumpulan data lapangan setelah sebelumnya menyelesaikan tahapan penyusunan desain survei dan kuesioner.

6. Sebagai bagian dari pertukaran pengetahuan dan pembelajaran, bertepatan dengan penyelenggaraan Global Wildlife Program (GWP) Annual Conference 2021, Proyek CIWT mempresentasikan 3 praktik baik yang bersumber dari aktivitas proyek dalam Knowledge Market Forum.



7. Dalam ikhtiar menorehkan sejarah Polisi Kehutanan di Indonesia dalam lintasan sejarah, proyek bekerja sama dengan Ikatan Polisi Kehutanan

Hari Lahir Polisi Kehutanan Indonesia pada 23 Desember 2021.

8. Inisiasi proyek bersama Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone,



Indonesia (IPKI) melakukan penulisan Buku Profil Sejarah Polisi Kehutanan di Indonesia. Penelusuran informasi dilakukan ke sumber informasi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur sebagai bagian memperoleh gambaran utuh mengenai Polisi Kehutanan di Indonesia. Salah satu hasilnya adalah informasi mengenai

Perempuan Inspiratif Mitra Polisi Kehutanan (PIMP), tampil dalam webinar daring People not Poaching Webinar yang diselenggarakan oleh IUCN CEESP/SSC Sustainable Use and Livelihoods Specialist Group (SULI), The International Institute for Environment and Development (IIED) dan TRAFFIC. Serta turut pula tampil dalam UNDP Biodiversity: Women Fighting Wildlife Crime.

9. Dalam upaya diversifikasi media pembelajaran terkait pemberantasan perburuan dan peredaran satwa liar dilindungi, proyek menyusun serangkaian video pembelajaran terkait SOP Pengumpulan dan Penanganan Barang Bukti dari Satwa Liar dan Tumbuhan untuk kepentingan identifikasi morfologis

dan DNA hasil kerja sama dengan Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ikhtiar ini diapresiasi dan dihadirkan dalam UNDP Biodiversity: Forensics in Wildlife. Turut pula diproduksi rangkaian video penanganan satwa liar dilindungi dari jenis mamalia, reptil, burung, dan primata.

Melacak Jejak Sang Kesatria Rimba

Penentuan hari jadi Polisi Kehutanan selama ini bak berkalah kabut. Masih meraba tanggal yang pasti.

Tabir itu mulai terkuak saat tim dari Ikatan Polisi Kehutanan Indonesia (IPKI), yang difasilitasi proyek, melakukan penelusuran lapangan guna menggali informasi dalam rangka penyusunan Buku Profil Sejarah Kehutanan Polisi Kehutanan Indonesia. Tim berhasil menemui Sunandar, Alumni Polisi Khusus Kehutanan Angkatan ke-1 Tahun 1966.

Sunandar, merupakan bagian dari anggota Pendidikan dan latihan (Diklat) Polisi Khusus Kehutanan Mobile Angkatan Pertama dengan kekuatan 147 orang yang dilantik oleh Menteri Pertanian Mayor Jenderal TNI Soetjipto SH pada tanggal 21 Desember 1966 di Alun-alun Pati Jawa tengah. Tanggal peresmian inilah yang kemudian diusulkan dan ditetapkan sebagai hari lahirnya Polisi Kehutanan (Polhut). Kini, Polhut yang memiliki moto Budi Bhakti Wirawana yang bermakna Ksatria rimba yang berdedikasi tinggi dan berakhlak mulia telah menemukan tanggal kelahirannya tak lagi berselubung gelap.



PENGARUSUTAMAAN GENDER



Dalam rangka mendukung pengarus-utamaan gender di lingkup penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, proyek memfasilitasi penyusunan modul pengajaran dan bahan kampanye terkait hal tersebut. Bahan-bahan tersebut rencananya akan dimanfaatkan oleh Pokja Gender Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bahan pengajaran dan kampanye terkait pengarus-utamaan gender dalam bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan kepada para pemangku kepentingan di lingkup internal dan eksternal Ditjen Gakkum LHK.

Tidak hanya itu, guna mendukung pengarus-utamaan gender di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, proyek turut terlibat menyokong kegiatan Gender Leader Summit (GLEADS) sebagai bagian dari Festival Gender



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021. GLEADS merupakan ruang percakapan tingkat tinggi di KLHK untuk memberikan inovasi/ide/gagasan terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender di Unit Kerja masing-masing. GLEADS diikuti oleh 37 partisipan eselon II di lingkup KLHK. Selain itu proyek turut pula memfasilitasi penyusunan modul pembelajaran dan pengajaran yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dalam lingkup penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan bersama ahli gender Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si.

Proyek pun tidak luput berpartisipasi dengan BP2SDM KLHK dalam pemetaan kompetensi Polisi Kehutanan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai pemetaan kompetensi dalam rangka penguatan kapasitas yang disesuaikan dengan masing-masing individu.

MIDTERM REVIEW



Indonesia

Combating Illegal and Unsustainable Trade in Endangered Species in Indonesia

Ask the project about its resources [here](#)

- [Mobile application for Indonesian Protected Wildlife Species Identification](#)
- [Additional Project Videos](#)
- [Women Community Forest Rangers Videos](#)
- [Additional resources](#)

Video: Women Community Forest Rangers



Research Report



Fact Sheet



FACT SHEET

SNARE REMOVAL PATROLS

Hundreds, if not thousands, animals in Indonesia forests lose their lives to the silent and most pervasive killer-snare. As stated by both Director General of Law Enforcement of Environment and Forestry and Director General of Natural Resources and Ecosystem Conservation, Ministry of Environment and Forestry, Indonesia now faced snares as a serious threat to Indonesian wildlife. Combating Illegal Wildlife Trade (CIWT) Project supported protected area management conducted snare removal patrols to reduce poaching as a direct threat to wildlife. The patrols

Fact Sheet



FACT SHEET

SPARTAN

SISTEM PEMANTAUAN KERAWANAN KEAMANAN HUTAN

Combating Illegal Wildlife Trade (CIWT) Project supported Directorate of Forest Protection, Directorate General of Law Enforcement, Ministry of Environment and Forestry developed SPARTAN (Forest Security Vulnerability Monitoring System)

Sebagai bagian tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan dalam midterm review (MTR), Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan bersama proyek telah menyelenggarakan pertemuan untuk membahas tindak lanjut rekomendasi.

Adapun hasil penilaian konsultan terkait pelaksanaan proyek sebagai berikut:

| | |
|---|--------------------------------|
| Outcomes 1 | Moderately Satisfactory |
| Outcomes 2 | Satisfactory |
| Outcomes 3 | Moderately Satisfactory |
| Outcomes 4 | Satisfactory |
| Project Implementation and Adaptive Management | Satisfactory |
| Project Progress Objective Level | Moderately Satisfactory |
| Project Sustainability | Moderately Likely |

TANTANGAN



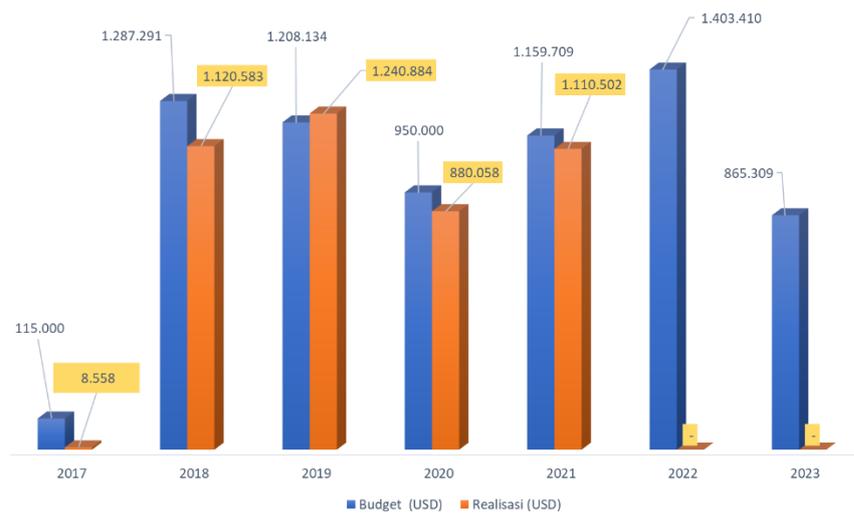
- **Pandemi Covid-19** yang menghantam Indonesia sempat berpengaruh dalam upaya implementasi lapangan proyek. Seiring dengan membaiknya kondisi penanganan Covid-19 dan penerapan protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, implementasi lapangan dapat kembali bergulir.
- **Mekanisme pendanaan kegiatan** yang mengacu pada peraturan COSS (*Country Office Support System*) UNDP menjadi tantangan tersendiri bagi *Project Management Unit* CIWT dalam melakukan implementasi kegiatan khususnya untuk kegiatan penegakan hukum yang bersifat dinamis.

IKHTISAR KEUANGAN



Di tengah deraan kondisi sosial dan politik yang terimbas oleh kebijakan yang berhubungan dengan penanganan Pandemi Covid-19, proyek tetap mampu menjaga kinerja. Hingga 24 Desember 2021, penyerapan proyek mencapai US\$1.110.502 dari pagu US\$1.155.709 = atau setara 96%.

BUDGET vs REALISASI



Total Kumulatif Realisasi:
USD 4,341,313
(62%)

